

## Media Sosial Dan Perdebatan Politik: Upaya Gereja Mereduksi Konflik Pemilu di Era Digital Dalam Bingkai Etis Teologis

Yonatan Alex Arifianto<sup>1</sup>, Jakson Sespa Toisuta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Blessing Indonesia, Makassar

Correspondence: arifianto.alex@gmail.com

Diterima : 07 November 2023

Direvisi : 17 November 2023

Disetujui : 27 November 2023

**Abstract:** *Abstract: This article aims to describe the important role of the church in theological ethics to deal with political conflicts that arise on social media during the election period in the digital era. Monitored debates on digital social media platforms create increasing political tensions and can trigger horizontal conflicts. The church therefore has the potential to play an important role in mitigating conflict and representing a more ethical dialogue. By using a theological ethical foundation, the church can provide a foundation and guide for values, reasoning and morals that are relevant to Christianity. Using descriptive qualitative methods with a literature study approach, it can be concluded that social media and political debate are the church's efforts to reduce election conflict in the digital era from an ethical and theological perspective. Firstly, Christianity can understand the importance of the nature of social media in politics and democratic parties so that with a theoretical study of the church and elections can foster theological ethical attitudes in the context of political debates where the church has a role in reducing election conflicts in the digital era.*

**Keywords:** *Social Media; Political Debate; Reducing Conflict; Election; Digital era; Theological Ethical*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pentingnya peran gereja dalam etika teologis untuk menghadapi konflik politik yang muncul di media sosial selama masa pemilu di era digital. Perdebatan dalam platform digital media sosial yang terpantau membuat ketegangan politik yang semakin meningkat dan bisa memicu konflik horizontal. Oleh karena itu gereja memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam meredakan konflik dan merepresentasikan dialog yang lebih etis. Dengan menggunakan landasan etika teologis, gereja dapat memberikan landasan dan panduan dari nilai dan nalar serta moral yang relevan bagi kekristenan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi *literature*. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa kekristenan dapat memahami pentingnya hakikat media sosial dalam politik dan pesta demokrasi sehingga dengan kajian teoritik gereja dan pemilu dapat menumbuhkan sikap etika teologis dalam konteks perdebatan politik yang mana gereja memiliki peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital.

**Kata Kunci:** Etis Teologis; Era Digital; Media Sosial; Mereduksi Konflik; Perdebatan Politik; Pemilu;

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat mendukung kebebasan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat. Kebebasan itu juga sering memunculkan konflik dan ketegangan di akar rumput. Hal itu dewasa ini dapat dilihat dari berbagai komentar di semua *platform* digital media sosial terkait konten pemilu. Saling meyudutkan bahkan saling mencaci maki terhadap pasangan calon pemimpin di bangsa ini sudah terlihat hal wajar dalam era globalisasi ini, karena peran kebebasan berpendapat tersebut. Memang di era digital, peran media sosial telah menjadi *platform* utama untuk berkomunikasi, berbagi pandangan politik, namun dewasa ini konten tersebut menghasilkan dampak negatif yang menghasilkan perdebatan publik yang tidak sehat dan santun. Sehingga kebebasan yang disertai *bullying* serta memiliki unsur merendahkan kemanusiaan terkait politik marak saat ini. Sering sekali konten politik menghasilkan ketegangan, polarisasi, dan konflik yang dapat merusak hubungan sosial antar masyarakat baik negara dan rakyatnya menjadi tercemar dengan kebencian. Harus diakui saat ini publik digital bebas menyampaikan pendapat mereka tentang apapun juga melalui media *online*. Jika pendapat yang disampaikan atas ketidakpuasan terhadap suatu kondisi seperti masalah politik dan pemerintahan maka dengan mudah para oknum politik maupun masyarakat luas dapat menyampaikan melalui media sosial. Hal tersebut tentunya juga menjadi sisi positif dalam menumbuhkan demokrasi di ranah virtual,<sup>1</sup> karena *platform* digital yaitu media sosial merupakan pendukung terbaik saat ini dalam jaringan komunikasi politik bagi demokrasi.<sup>2</sup>

Media sosial saat ini memang merupakan sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari.<sup>3</sup> Seiring dengan berkembangnya globalisasi, penggunaan media sosial semakin tinggi.<sup>4</sup> Media sosial memberikan ruang bagi publik untuk dapat mengungkapkan kebebasan tersebut, namun masalah baru juga sering terjadi dengan saling sindir dan perang status, bahkan sampai pada level perdebatan serta saling mengejek antara kelompok yang pro maupun kontra tentang suatu masalah dan pilihan calon pemimpin.<sup>5</sup> Sebab melalui *platform* digital media sosial, substansi pesan-pesan politik lebih cepat dan mudah dicerna oleh khalayak, dan tentunya setiap saat khalayak dapat mengakses informasi tanpa halangan dan batas

---

<sup>1</sup> Christiany Juditha, "Demokrasi Di Media Sosial: Kasus Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 17, no. 1 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.31346/jpikom.v17i1.1354>.

<sup>2</sup> Eko Harry Susanto, "Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (September 2017): 379, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>.

<sup>3</sup> Fitria Utami, "Media Sosial Dan Partisipasi Politik Milenial Riau," *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 3, no. 1 (2020): 65–84, <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1158>.

<sup>4</sup> Uly Sophia and Noviwintarti Noviwintarti, "Pemetaan Media Massa Dan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Pada Pilkada Kota Tanjungpinang 2018," *Jurnal Riset Komunikasi* 2, no. 2 (2019): 184–201, <https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i2.66>.

<sup>5</sup> Juditha, "Demokrasi Di Media Sosial: Kasus Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."

geografis.<sup>6</sup> Namun pesan-pesan politik yang disebar secara cepat dapat menuai tanggapan pro dan kontra dalam agenda kepentingan para politisi. Apalagi dalam pesta demokrasi keinginan untuk memenangkan kontestasi politik harus dengan segala cara. Seperti memakai dan menghadirkan isu negatif dan berita palsu dalam konten di media sosial hadir dan menjelma di tengah masyarakat digital.<sup>7</sup> Sehingga banyak para pendukung paslon kerap kali melanggar prinsip-prinsip kesantunan dalam berpolitik.<sup>8</sup> Yang mana era kontemporer dalam demokrasi elektoral dewasa ini sangat menunjukkan arogansi dan pertarungan politik yang sangat kompetitif, keras, dan melibatkan berbagai isu sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>9</sup> Di mana upaya-upaya jahat ini sepertinya sukar untuk dihindari di era virtual, karena masing-masing tim paslon atau politisi yang terlibat langsung sedapat mungkin menggunakan segala cara untuk mematahkan perjuangan lawannya, demi suara dan kepentingan politik sendiri.<sup>10</sup> Sehingga menghancurkan kemanusiaan yang harus dijunjung hanya demi karir atau jabatan politik yang ada masanya.

Banyaknya kasus perdebatan dalam media sosial di akar rumput terus meningkat seiring mendekati pesta demokrasi. Seperti yang terjadi dalam kampanye konvensional seperti pengerahan massa untuk merapatkan barisan terasa hampa. Di balik keramaian massa dengan berbagai atribut, terasa sepi makna. Keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah ke ruang-ruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling tuduh secara frontal begitu bebas terjadi di berbagai media sosial.<sup>11</sup> Di mana hal itu terkait adanya tahun politik atau dapat disebut "tahun panas". Hal tersebut nampaknya muncul semenjak pemilihan gubernur DKI, dan pada akhirnya setiap tahun menjadi tahun politik. Perdebatan di sosial media selalu panas, namun tidak pernah sepanas bulan-bulan belakangan menjelang pemilihan presiden.<sup>12</sup> Sehingga penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam pemilu di Indonesia mengakibatkan fanatisme yang berlebihan. Kampanye di jejaring sosial tidak lagi sebatas pada penyebaran visi, misi, dan program para calon kepada masyarakat melainkan berisi muatan yang mendiskreditkan calon lainnya dan cenderung

---

<sup>6</sup> Haidir Fitra Siagian, "Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik," *Al-Khitabah* 2, no. 1 (2015): 17–26.

<sup>7</sup> Mahpudin Mahpudin, "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi Dan Kepercayaan," *Jurnal PolGov* 1, no. 2 (2019): 157–63, <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.

<sup>8</sup> Duddy Zein and NFN Wagiaty, "Kekerasan Verbal Dalam Merespons Status Dan Komentar Politik Di Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Kesantunan Berbahasa," *Suar Betang* 16, no. 1 (2021): 23–38, <https://doi.org/10.26499/surbet.v16i1.231>.

<sup>9</sup> Faisal Fadilla Noorikhshan et al., "Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 95–109, <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>.

<sup>10</sup> Eko azi septiawan, Belli Nasution, and Muchid, "Pengelolaan Pesan Politik Di Media Sosial Dalam Kampanye Pemenangan Pasangan Paisal-Amris Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2022," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2022): 649–58, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2775>.

<sup>11</sup> Toto Sugiarto, "Media Sosial Dalam Kampanye Politik," *Kompas.com*, 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/29/1153482/Media.Sosial.dalam.Kampanye.Politik?page=all>.

<sup>12</sup> Bondhan Kresna W, "Cara Meladeni Debat Di Media Sosial," *Kompas.com*, 2018, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/29/14401531/cara-meladeni-debat-di-media-sosial?page=all>.

mengarah pada penghinaan atau pencemaran nama baik dengan isu yang tidak berdasar.<sup>13</sup> Praktik politik jahat benar-benar menggerus moralitas umat beragama,<sup>14</sup> dan meningkatkan ujaran kebencian dalam ruang media sosial yang semakin mengkhawatirkan. Pendukung dari politisi mudah sekali terpancing untuk melemparkan kebencian berkaitan dengan masalah politik.<sup>15</sup> Di mana pengguna media sosial gampang terpancing untuk melemparkan kebencian berkaitan dengan masalah politik, program pemerintah, dan urusan agama. Oleh karena itu gereja dan kekristenan, sebagai lembaga dengan dasar etis teologis serta kebenaran yang dijunjung, memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang positif dalam meredakan konflik politik di ruang digital atau virtual dan mempromosikan perdebatan yang sehat dan santun dengan dialog yang lebih etis.

Berkaitan dengan topik artikel ini, media sosial dan perdebatan politik: upaya gereja mereduksi konflik pemilu di era digital dalam bingkai etis teologis. Pernah dilakukan penelitian oleh, Winda Wana Utami dan Darmaiza dalam penelitiannya berjudul *hate speech*, agama, dan kontestasi politik di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan sarkasme atau sindiran dalam menyebarkan *hate speech* atau ujaran kebencian yang terkait kontestasi politik. Ujaran kebencian dijadikan salah satu strategi memenangkan kontestasi politik dengan cara penyebaran kampanye hitam (black campaign), berita bohong, *hoax*, dan diskriminasi via media sosial.<sup>16</sup> Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Faisal Fadilla Noorikhshan, Hilal Ramadhani, Budi Chrismanto Sirait, dan Nisa Khoerunisa. Membahas penelitian yang similar dengan judul dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemporer: tinjauan relasi negara-masyarakat. Noorikhshan dkk., menekankan dalam pembahasannya bahwa media mampu menjadi sarana interaksi politik antar negara-masyarakat yang menunjukkan kuatnya hubungan di antara keduanya. Di mana internet akan terus menjadi subjek yang menarik dan dinamis dan berdampak dalam politik negara-masyarakat yang ditimbulkan atas adanya berbagai media. Kondisi tersebut memunculkan berbagai kemungkinan adanya dinamika baru yang melibatkan perkembangan teknologi komunikasi dan isu-isu yang menggunakan internet sebagai basis realisasinya.<sup>17</sup> Berdasarkan latar belakang masalah, dan adanya fenomena serta penelitian terdahulu masih ada celah yang belum diteliti yaitu adanya *platform* digital media sosial dalam lingkaran perdebatan politik. Sehingga kajian tersebut digali dari sudut pandang dan bingkai teologi

---

<sup>13</sup> Linda Ismaya and Rizca Sugiyantica, "Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Sebagai Sebuah Kejahatan Mayantara Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( Kuhp ) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun," *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 3 (2014): 238-45.

<sup>14</sup> Ignasius Suswakara, "Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja)," *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 3, no. 1 (2018): 45-52, <https://doi.org/10.53949/ar.v3i1.62>.

<sup>15</sup> Machradin Wahyudi Ritonga, "Ujaran Kebencian Dan Politik Identitas Di Tahun Politik Perlu Diwaspadai," *Kompas.id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/08/ujaran-kebencian-dan-politik-identitas-di-tahun-politik-perlu-diwaspadai>.

<sup>16</sup> Winda Wana Utami and Darmaiza Darmaiza, "Hate Speech, Agama, Dan Kontestasi Politik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 113-28.

<sup>17</sup> Noorikhshan et al., "Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat."

iman Kristen, supaya dapat mereduksi konflik di dalam ruang publik digital. Oleh sebab itu penelitian ini dapat memberi sumbangsih kepada umat Tuhan dan kekristenan pada umumnya supaya memiliki pengetahuan dan paradigma untuk mereduksi perdebatan dalam ruang publik terkait hoak pada kampanye hitam. Hal ini sebagai langkah gereja dan kepemimpinan Kristen untuk mewujudkan langkah konkrit dalam membangun etis teologis dalam berpolitik yang santun dan tidak melanggar serta tidak merendahkan kemanusiaan hanya karena politik di akar rumput dalam ruang publik digital.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,<sup>18</sup> yang memusatkan pada peran gereja untuk mereduksi konflik pemilu dalam dunia digital dalam etis teologis. Sumber data utama yang digali dalam penelitian ini adalah teks Alkitab yang menelusuri tentang kajian teoritik gereja dan pemilu yang berlandaskan nilai Alkitab. Selanjutnya artikel ini didukung oleh berbagai kajian teori literatur yang bertema relevan atau similar diantaranya dari berbagai artikel yang diterbitkan dalam publikasi jurnal, artikel umum dalam media *online*, begitu juga dengan pencarian data dari portal berita nasional. Tentunya hasil eksplorasi dari berbagai media dalam konteks perdebatan politik yang dapat membawa pertikaian harus direduksi. Dengan demikian pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (*library research*). Pembahasan diawali dengan uraian tentang hakikat media sosial dalam politik dan pesta demokrasi. Selanjutnya menarasikan kajian teoritik gereja dan pemilu sehingga dimunculkan sebagai peran etika teologis dalam konteks perdebatan politik. Hasil kajian dinarasikan sebagai pola peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital untuk dapat membangun kebijakan politik yang santun di akar rumput dalam era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Media Sosial dalam Politik dan Pesta Demokrasi**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin memudahkan interaksi antar individu maupun kelompok. Lalu lintas pesan dan pemberitaan terkait apapun termasuk pemilu tidak sepenuhnya dikuasai negara tetapi bebas mengalir pada khalayak ramai. Sebab *platform* digital media sosial yang memiliki sumber daya dan kekuatan dalam penyebaran informasi yang canggih menjadi pilihan untuk memengaruhi, memotivasi, dan melakukan tindakan yang dikehendaki oleh penyebar pesan guna meraup keuntungan suara.<sup>19</sup> Memang tidak dapat dipungkiri media sosial telah digunakan untuk tujuan dan agenda politik. Hal itu didasarkan karena media sosial bersifat sangat mudah diakses saat ini, dan hal itu dapat terkoneksi bila *gadget* dapat terhubung dengan internet, memberikan kesempatan kepada semua politisi untuk memanfaatkan

---

<sup>18</sup> Umriati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 46.

<sup>19</sup> Susanto, "Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik."

dan menggunakannya dengan tujuan agenda politiknya, namun adanya persoalan yang muncul adalah pesan atau agenda politik yang diarahkan kepada lawan politik dalam bentuk berita bohong sebagai *black campaigning*.<sup>20</sup> Di mana hal itu membunuh karakter dan memunculkan perdebatan sengit dalam komentar-komentar pembelaan atau juga klaim sepihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial, dan politik sebagai bagian integral dalam realitas sosial kontemporer dewasa ini,<sup>21</sup> sangat berperan besar terjadinya konflik horizontal.

Para politisi berani memanfaatkan media sosial secara efisien dan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya.<sup>22</sup> Di mana para politisi menggunakan media sosial terutama selama kampanye dan pemilihan.<sup>23</sup> Sehingga berdampak bagi para pemilih generasi untuk dapat memilih di mana kebanyakan mereka bersikap apatis dan skeptis terhadap dunia politik.<sup>24</sup> Tentunya bagi para politisi peran sosial media dalam aktivitas politik tanah air semakin besar, khususnya dalam menyebarkan ide, gagasan, informasi, maupun komentar. Pemilihan umum presiden merupakan pesta demokrasi terbesar tiap lima tahunan, di mana keterlibatan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilannya.<sup>25</sup> Sebab hal itu merupakan instrumen yang strategis dalam kehidupan politik masyarakat modern, memang sudah sejak lama dari tiga dekade yang lalu hingga saat ini masih terus digunakan dalam perpolitikan dan hal itu terus memantik perdebatan seiring pergeseran realitas politik.<sup>26</sup> Dari tradisional ke era digital yang sangat memudahkan untuk memengaruhi pemilih. Media sosial sebagai sumber informasi utama sekarang ini hanya sebagai penegas,<sup>27</sup> untuk menyampaikan informasi yang memang dikendalikan dengan berbagai agenda politik.

Media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, hal itu di karenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau

---

<sup>20</sup> Eko azi septiawan, Belli Nasution, and Muchid, "Pengelolaan Pesan Politik Di Media Sosial Dalam Kampanye Pemenangan Pasangan Paisal-Amris Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2022."

<sup>21</sup> Noorikhshan et al., "Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat."

<sup>22</sup> Siagian, "Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik."

<sup>23</sup> Nindi Utari, "Penggunaan Media Sosial Dan Transformasi Pemasaran Politik Dan Kampanye Demokrasi Yang Berkembang Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1515–24, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.199>.

<sup>24</sup> Nuryadi Kadir, "Media Sosial Dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 4, no. 2 (2022): 180–97, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>.

<sup>25</sup> Dyan Rahmiati Soebakir, Bayu Indra Pratama, and Abdul Hair, "Pemetaan Meme Politik Pasca Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 58–66, <https://doi.org/10.21070/kanal.v8i2.220>.

<sup>26</sup> Launa and Hayu Lusianawati, "Diskursus Ideologi Media: Dari Perspektif Liberal-Pluralis Hingga Post-Strukturalis," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 1, no. 2 (2020).

<sup>27</sup> Mulnanur Rohim and Amika Wardana, "Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada Pemilu 2019 Di Indonesia," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): 47–63, <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.47-63>.

bagi masyarakat dalam mengakses media sosial.<sup>28</sup> Sebab hal itu dipengaruhi banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu saja memunculkan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi dalam menjangkau partisipan dan pemilih dalam pesta demokrasi.<sup>29</sup> Maka kehadiran media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung para kontestan politik.<sup>30</sup> Tentunya media sosial menjadi sarana bersosialisasi untuk mendulang suara dalam kontestasi politik serta menentukan opini yang menjadi perbincangan masyarakat.<sup>31</sup> Untuk itu para politisi dan calon pemimpin yang terlibat dalam pesta demokrasi, dapat memaksimalkan agenda politik dan program dengan menyebarkan informasinya lewat media sosial, agar harapan tersebut mendapatkan dukungan demokrasi dari para pemilih. Politik dan media sosial dalam ruang pesta demokrasi memiliki banyak manfaat namun miris bila perdebatan politik dalam konten pemilu membawa kebencian sampai pada akar rumput pemilih. Hal itu disebabkan dari kebebasan berpendapat yang tidak dikontrol dan mementingkan secara egois agar paslon pilihannya dapat memenangkan pemilu tanpa lagi mementingkan kebersamaan dan tidak lagi menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka dalam konteks komunikasi politik, keberadaan media sosial sejatinya sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk berbicara langsung dengan para pemimpin politik, mengemukakan pendapat dan kritik, serta membangun gerakan sosial yang lebih kuat secara *online*. Dengan adanya media sosial dan keberadaan dunia internet, maka diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik.<sup>32</sup> Bertujuan untuk terus mengarah pada persatuan dan kesatuan demi memajukan bangsa dan menjaga solidaritas dan kebersamaan sesama anak bangsa.

### **Kajian Teoritik Peran Gereja dan Pemilu**

Sikap gereja terhadap politik adalah isu yang masih terus relevan untuk didiskusikan oleh kekristenan dan para pemimpin gereja di bangsa Indonesia. Setiap kali menjelang pemilu atau menyikap isu-isu tertentu dalam politik negara, orang Kristen ramai meributkan sikap yang sebaiknya diambil gereja dan kekristenan. Sejauh ini sikap yang banyak diambil dalam kekristenan

---

<sup>28</sup> Muhammad Irfan Dwitama et al., "Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 3, no. 1 (2022): 53–61, <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>.

<sup>29</sup> Rangga Putra Perssela, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadianti, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)* 2, no. 3 (2022): 650–56, <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>.

<sup>30</sup> Dwitama et al., "Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan."

<sup>31</sup> Delco Adia Putra, Yazwardi Yazwardi, and Muhammad Sirajudin Fikri, "Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Hasil Pemilihan Presiden 2019," *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.19109/ampera.v2i1.7427>.

<sup>32</sup> Noorikhshan et al., "Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat."

adalah menjauhkan diri dari politik atau sekurang-kurangnya netral demi menjaga kekudusan gereja.<sup>33</sup> Namun di era keterbukaan ini, tentunya gereja sebagai institusi agama di dalam secara intern harus berani mendorong partisipasi politik masyarakat untuk maju dalam perpolitikan.<sup>34</sup> Yang mana politik yang dibangun harus mengedepankan kemanusiaan dan menghormati manusia secara keseluruhan dalam agenda politiknya. Gereja harus memunculkan dirinya sebagai contoh yang baik dalam partisipasinya terhadap dinamika politik yang terus ada di negara demokrasi ini. Hal ini akan membantu warga gereja atau umat Kristen dalam berpartisipasi terhadap kegiatan berpolitik, agar tidak menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan.<sup>35</sup> Oleh karena itu umat Kristen harus memiliki prioritas dan tujuan politik yang fokus semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, yang tentunya juga harus searah dengan tujuan Allah yaitu menghadirkan shalom bagi bangsa-bangsa.<sup>36</sup> Di mana adanya tujuan gereja dalam perpolitikan untuk membawa kedamaian dan membawa orang percaya hidup dalam persekutuan sesama umat Allah, sehingga dengan hadirnya kekristenan yang bernalarkan kebenaran dapat memuliakan Allah melalui perilaku dalam dunia perpolitikan. Gereja juga memiliki peran penting untuk mendewasakan umat Allah melalui pengajaran dan teladan Yesus yang bersumber dari kebenaran mutlak alkitabiah.

Dalam menarasikan dari makna kata gereja yang berasal dari istilah di dalam bahasa Yunani yaitu kata *ekklesia*. Kata itu terdiri dari akar kata *ecclesiastical*, yang berarti dapat dipahami secara literal adalah adanya pertemuan atau perhimpunan.<sup>37</sup> Kata gereja juga berasal dari kata *Igreja* bahasa Portugis yang asalnya juga dari kata *Ekklesia* yaitu *ek* dan *kaleo* (memanggil) bahasa Yunani yang maknanya kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia.<sup>38</sup> Begitu juga dengan makna kata gereja dari bahasa Inggris adalah *church* berhubungan dengan kata *Kirk* dari bahasa Skotlandia atau kata *Kirche* dari bahasa Jerman yang semuanya berasal dari kata *Kuriakon* bentuk ajektif dari kata *Kurios* bahasa Yunani yang mengandung arti sebagai milik Tuhan.<sup>39</sup> Gereja sebagai perkumpulan yang dimiliki oleh Tuhan, maka harus mengedepankan sifat dan perilaku yang menjadi terang atau menjadi berkat bagi sesama. Dalam dunia pesta demokrasi atau pemilu, gereja harus menjadi teladan untuk memunculkan pesan kebersamaan dan sejatinya gereja harus mereduksi setiap perdebatan yang mengarah pada politik identitas atau merendahkan kemanusiaan. Memang kekristenan diperbolehkan terlibat aktif dalam pesta demokrasi dan perpolitikan praktis. Namun tujuan yang diharapkan dalam perpolitikan itu bukan untuk menghapuskan kuasa, tetapi untuk

---

<sup>33</sup> Markus Dominggus Lere Dawa, "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik," *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 54–78, <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.40>.

<sup>34</sup> Abu Bakar and Muh. Wahyu, "Gereja Dan Partisipasi Politik," *Vox Populi* 5, no. 1 (2022): 61–69, <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29646>.

<sup>35</sup> Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.

<sup>36</sup> Yohanis Udju Rohi, "Misi Gereja Melalui Dunia Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 32–55.

<sup>37</sup> Robert & Paul Stevens, "The Complete Book of Everyday Christianity" (Kalam Hidup, 2012), 191–92.

<sup>38</sup> W. R. F. Browing, *Kamus Alkitab*, 1st ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

<sup>39</sup> Paul Enns, *The Moody Handbook Of Theology 1*, 3rd ed. (Malang: Literatur SAAT, 2006).

berusaha supaya kuasa dapat dipakai untuk tujuan yang benar dan adil. Maka kekristenan perlu belajar bagaimana menghubungkan moralitas dengan kuasa supaya ia berhasil memperbaiki masyarakat,<sup>40</sup> menghapuskan diskriminasi, *bullying* dan semacam berita hoaks dalam politik di era digital ini.

### **Etika Teologis Dalam Konteks Perdebatan Politik**

Dasar-dasar etika teologis yang dideskripsikan harusnya dapat menjadi panduan bagi gereja dan kekristenan dalam menghadapi perdebatan politik di era digital dan globalisasi ini. Sebab hal itu mencakup prinsip-prinsip moral yang relevan, seperti kasih, perdamaian, keadilan, dan rasa hormat terhadap manusia sebagai citra Tuhan. Di mana ada perdebatan politik, etika teologis membawa aspek-aspek merendahkan manusia ke dalam pembahasan tentang tindakan-tindakan agenda politik. Keterkaitan etis teologi dan perdebatan politik harus menekankan pentingnya kebijakan yang menghormati prinsip-prinsip ini dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan hak asasi kemanusiaan. Maka dalam perdebatan politik, etika teologis dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan politik atau kebijakan melindungi hak-hak asasi manusia atau malah melanggarnya. Ini yang menjadi peran dari kekristenan supaya para politisi diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip moral, dan nalar yang sesuai prinsip kemanusiaan yang dianut oleh kekristenan. Sehingga para politisi diharapkan untuk menghindari retorika yang merendahkan atau menghasut kebencian terhadap SARA. Maka sejatinya kekristenan wajib menghindari kebohongan atau manipulasi dalam upaya agenda politik hanya demi jabatan kekuasaan yang sementara.

Dalam kajian Alkitab perdebatan politik yang dapat mengasah program kerja bagi kepentingan masyarakat harusnya dilakukan dengan cara lemah lembut dan dengan rasa hormat. Sebab setiap tindakan dan perkataan yang dilakukan dalam kekristenan diminta pertanggungjawaban (1 Pet 3:15). Hal ini menyangkut hati yang murni dengan tujuan memperlakukan Kristus disetiap lini kehidupan. Tidak dipungkiri bahwa dalam perdebatan politik, kekristenan harus menghindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekocokan dan pertengkaran yang tidak berguna dan sia-sia belaka (Tit 3:9). Harus menghindari untuk mencari-cari soal dan membesarkan masalah dengan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekocokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran (2 Tim 6:4-5), bahkan Rasul Paulus menegaskan untuk mengingat supaya umat Tuhan jangan bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya (2 Tim 2:14). Perdebatan yang membawa pada tindakan kebencian harus dihindari oleh umat Tuhan. Sebab Tuhan juga menginginkan untuk menghormati orang lain. Seperti yang dinyatakan dalam Matius 7:12, dinyatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka; karena inilah yang ditekankan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Efesus 4:29 juga

---

<sup>40</sup> F S Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1-16, <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/66>.

dengan tegas kekristenan diingatkan untuk tidak mengeluarkan perkataan yang kotor yang keluar dari mulutmu, melainkan yang baik untuk membina, sesuai dengan kebutuhan, supaya dapat memberi kasih karunia kepada orang yang mendengarnya. Semuanya itu dinyatakan untuk membangun dan membawa kedamaian bagi sesama, maka kekristenan diharapkan dalam bicara dan berperilaku harus penuh hikmat kepada mereka yang di luar (Kol 4:6). Sebab kekristenan dipanggil untuk mendapat berkat dan tidak membenarkan untuk membalas dengan hinaan, atau dengan berkata-kata kasar, tetapi sebaliknya, berkatilah (1 Pet 3:9).

### **Peran Gereja Dalam Mereduksi Konflik Pemilu Di Era Digital**

Dampak negatif dari pengaruh media sosial salah satunya terkait dengan maraknya kemunculan ujaran kebencian di media sosial,<sup>41</sup> yang mengakibatkan disintegrasi dan konflik horizontal sesama anak bangsa. Akibat dari perselisihan dan komentar yang merendahkan sesamanya dalam *platform* digital. Maka konflik dalam pemilu ini harus ditangani dengan baik supaya dapat membawa kepada politik yang sehat dan santun. Oleh karena itu setiap umat Tuhan harus memfilter informasi yang muncul di media sosial sehingga suasana menjadi lebih kondusif.<sup>42</sup> Sebab adanya pergeseran struktur media ini membawa dampak terhadap kemunculan otoritas-otoritas baru dengan kehadiran penggaung, yang sebelumnya hanya digunakan dalam ranah periklanan. Namun saat ini sebagai bagian dari agensi, otoritas baru ini membawa kepada kreativitas dalam mengkampanyekan gagasan agenda politik dan aktivitas destruktif yang dapat memecah sensitivitas solidaritas kebangsaan dan kenegaraan di level akar rumput demi meraup suara elektoral.<sup>43</sup> Memang harus diakui bahwa masyarakat atau pemilih ini merupakan penentu politik itu sendiri dan sebagai fungsi kontrol politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>44</sup> Dengan melalui *platform* digital media sosial dinilai sangat efektif digunakan sebagai media komunikasi khususnya dalam memberikan informasi. Sehingga suara pemilih bisa digiring untuk tujuan politik. Media sosial juga dapat mendekatkan dan merapatkan hubungan antara komunikator politik dengan masyarakat.<sup>45</sup>

Peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital memiliki dampak yang penting dalam mendorong perdamaian, pemahaman, dan kerukunan sosial selama proses pesta demokrasi. Juga gereja dapat mengupayakan dalam merepresentasikan pentingnya berpartisipasi dengan

---

<sup>41</sup> M. A. Ash-Shidiq and A. R. Pratama, "Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik," *Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–11.

<sup>42</sup> HERNING SURYO and HARYO KUSUMO AJI, "Media Sosial Dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial)," *Research Fair Unisri* 4, no. 1 (2020): 87–94, <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3390>.

<sup>43</sup> Wahyudi Akmaliah, "Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial Dan Transformasi Arena Politik," *MAARIF* 13, no. 1 (2018): 9–25.

<sup>44</sup> Alter I Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–23, <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.

<sup>45</sup> Siagian, "Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik."

integritas dan menghindari praktik-praktik yang merusak, seperti penyebaran berita hoaks atau berita palsu, dan pernyataan retorika yang membakar konflik horizontal. Terlebih adanya perang media sosial dalam media sosial seperti penyebaran berita hoaks,<sup>46</sup> yang sangat masif terjadi dewasa ini. Maka gereja harus menjadi pelopor politik santun yang menghargai kemanusiaan. Di mana gereja juga harus mendukung pemimpin yang berkomitmen untuk mengabdikan kepada masyarakat dan memegang teguh prinsip-prinsip moral untuk menjalankan pemerintahan. Terlebih gereja yang memiliki jemaat untuk diberdayakan menjadi agen-agen perdamaian dan perubahan di seluruh lapisan masyarakat. Sebab melalui paradigma yang benar dan pendidikan Kristen serta pelatihan untuk mencapai sumber daya manusia yang bermartabat dan bermanfaat bagi sesama dan bangsa. Maka gereja dapat membantu anggotanya untuk berkontribusi positif dalam meredakan konflik dan mempresentasikan toleransi dalam masyarakat sosial dengan konten-konten kerukunan sosial yang mengedepankan kebersamaan dalam membangun bangsa. Oleh karena itu gereja, melalui umatnya, harus berperan aktif dalam ruang publik politis sebagai wujud memberitakan kedamaian dalam politik.<sup>47</sup> Juga sejatinya gereja dapat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik sosial yang mungkin muncul selama pra pemilu. Ini termasuk program-program pemberian makanan, bantuan medis, dan dukungan sosial bagi mereka yang terlibat konflik-konflik kepentingan. Bahkan gereja dapat menyediakan ruang untuk dialog baik *online* maupun *offline* dari berbagai pihak yang menginginkan ruang diskusi sehat. Dengan demikian peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital sangat penting dalam menjaga perdamaian demi perdamaian sosial dalam masyarakat luas dan tentunya gereja harus mendukung proses demokratis yang santun dan sehat, demi terciptanya masyarakat yang saling menghargai di ruang publik manapun.

## KESIMPULAN

Pentingnya peran gereja dalam menghadapi konflik politik di media sosial terkait perdebatan pra pemilu harus tetap berpegang pada etika teologis yang kuat. Dengan pendekatan yang bijaksana dan etis, gereja dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan damai di tengah perdebatan politik yang semakin sengit di era digital dewasa ini. Peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu melalui media sosial sangat penting. Hal itu berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai di dalam bingkai etis teologis yang mendorong kasih, toleransi, keadilan, dan perdamaian serta kebersamaan. Tentunya gereja berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan demokratis, tidak terlibat perang terbuka dengan perdebatan yang miris mengoyak kemanusiaan dan terlebih penting gereja dapat mengimbangi dampak negatif media

---

<sup>46</sup> Fitria Barokah et al., "Disrupsi Politik," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.

<sup>47</sup> Grets Janialdi Apner Siregar, "Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia," *Diegesis : Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.46933/dgs.vol6i21-24>.

sosial dalam politik. Oleh sebab itu dapat disimpulkan, pertama kekristenan dapat memahami pentingnya hakikat media sosial dalam politik dan pesta demokrasi sehingga dengan kajian teoritik gereja dan pemilu dapat menumbuhkan sikap etika teologis dalam konteks perdebatan politik yang mana gereja memiliki peran gereja dalam mereduksi konflik pemilu di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliah, Wahyudi. "Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial Dan Transformasi Arena Politik." *MAARIF* 13, no. 1 (2018): 9–25.
- Ash-Shidiq, M. A., and A. R. Pratama. "Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik." *Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–11.
- Bakar, Abu, and Muh. Wahyu. "Gereja Dan Partisipasi Politik." *Vox Populi* 5, no. 1 (2022): 61–69. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29646>.
- Barokah, Fitria, Tabah Maryanah, Ari Darmastuti, and Hertanto Hertanto. "Disrupsi Politik." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.
- Browing, W. R. F. *Kamus Alkitab*. 1st ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Dawa, Markus Dominggus Lere. "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 54–78. <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.40>.
- Dwitama, Muhammad Irfan, Firza Alif Hakiki, Endang Sulastri, Usni Usni, and Djoni Gunanto. "Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 3, no. 1 (2022): 53–61. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>.
- Eko azi septiawan, Belli Nasution, and Muchid. "Pengelolaan Pesan Politik Di Media Sosial Dalam Kampanye Pemenangan Pasangan Paisal-Amris Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2022." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2022): 649–58. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2775>.
- Enns, Paul. *The Moody Handbook Of Theology* 1. 3rd ed. Malang: Literatur SAAT, 2006.
- Ismaya, Linda, and Rizca Sugiyantica. "Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Sebagai Sebuah Kejahatan Mayantara Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( Kuhp ) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun." *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 3 (2014): 238–45.
- Juditha, Christiany. "Demokrasi Di Media Sosial: Kasus Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 17, no. 1 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v17i1.1354>.
- Kadir, Nuryadi. "Media Sosial Dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial Dan Gen Z." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 4, no. 2 (2022):

180–97. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>.

- Kresna W, Bondhan. “Cara Meladeni Debat Di Media Sosial.” Kompas.com, 2018. <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/29/14401531/cara-meladeni-debat-di-media-sosial?page=all>.
- Launa, and Hayu Lusianawati. “Diskursus Ideologi Media: Dari Perspektif Liberal-Pluralis Hingga Post-Strukturalis.” *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 1, no. 2 (2020).
- Mahpudin, Mahpudin. “Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi Dan Kepercayaan.” *Jurnal PolGov* 1, no. 2 (2019): 157–63. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.
- Manafe, F S. “Sikap Kristen Dalam Arena Politik.” *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1–16. <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/66>.
- Noorikhshan, Faisal Fadilla, Hilal Ramdhani, Budi Chrismanto Sirait, and Nisa Khoerunisa. “Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat.” *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 95–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>.
- Putra, Delco Adia, Yazwardi Yazwardi, and Muhammad Sirajudin Fikri. “Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Hasil Pemilihan Presiden 2019.” *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.19109/ampera.v2i1.7427>.
- Putra Perssela, Rangga, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadiani. “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)* 2, no. 3 (2022): 650–56. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>.
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale.” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.
- Ritonga, Machradin Wahyudi. “Ujaran Kebencian Dan Politik Identitas Di Tahun Politik Perlu Diwaspadai.” Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/08/ujaran-kebencian-dan-politik-identitas-di-tahun-politik-perlu-diwaspadai>.
- Rohi, Yohanis Udju. “Misi Gereja Melalui Dunia Politik.” *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 32–55.
- Rohim, Mulkanur, and Amika Wardana. “Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada Pemilu 2019 Di Indonesia.” *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): 47–63. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.47-63>.
- Siagian, Haidir Fitra. “Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik.” *Al-Khitabah* 2, no. 1 (2015): 17–26.
- Siregar, Grets Janialdi Apner. “Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia.” *Diegesis : Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.46933/dgs.vol6i21-24>.
- Soebakir, Dyan Rahmiati, Bayu Indra Pratama, and Abdul Hair. “Pemetaan Meme Politik Pasca Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 58–66. <https://doi.org/10.21070/kanal.v8i2.220>.
- Sophia, Uly, and Noviwintarti Noviwintarti. “Pemetaan Media Massa Dan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Pada Pilkada Kota Tanjungpinang 2018.” *Jurnal Riset Komunikasi* 2, no. 2

- (2019): 184–201. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i2.66>.
- Stevens, Robert & Paul. "The Complete Book of Everyday Christianity," 620. Kalam Hidup, 2012.
- Sugiarto, Toto. "Media Sosial Dalam Kampanye Politik." Kompas.com, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/29/1153482/Media.Sosial.dalam.Kampanye.Politik?page=all>.
- Suryo, Herning, and Haryo Kusumo Aji. "Media Sosial Dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial)." *Research Fair Unisri* 4, no. 1 (2020): 87–94. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3390>.
- Susanto, Eko Harry. "Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (September 2017): 379. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>.
- Suswakara, Ignasius. "Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja)." *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 3, no. 1 (2018): 45–52. <https://doi.org/10.53949/ar.v3i1.62>.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Utami, Fitria. "Media Sosial Dan Partisipasi Politik Milenial Riau." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 3, no. 1 (2020): 65–84. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1158>.
- Utami, Winda Wana, and Darmaiza Darmaiza. "Hate Speech, Agama, Dan Kontestasi Politik Di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 113–28.
- Utari, Nindi. "Penggunaan Media Sosial Dan Transformasi Pemasaran Politik Dan Kampanye Demokrasi Yang Berkembang Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1515–24. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.199>.
- Wowor, Alter I. "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–23. <https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23>.
- Zein, Duddy, and NFN Wagiaty. "Kekerasan Verbal Dalam Merespons Status Dan Komentar Politik Di Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Kesantunan Berbahasa." *Suar Betang* 16, no. 1 (2021): 23–38. <https://doi.org/10.26499/surbet.v16i1.231>.